



Peran Organisasi Keagamaan dalam Mewujudkan Kesenjangan dan Keadilan Gender

Mathilda Agnes Maria Wowor
Universitas Multimedia Nusantara, Tangerang
mathilda.birowo@gmail.com

Abstract

One of the challenges in gender issues is that society's understanding of gender is not yet comprehensive. This article explains the importance of the involvement and collaboration of religious organizations in Indonesia in the context of gender justice and equality. The Secretariat for Gender and Women's Empowerment (SGPP) of the Indonesian Bishops' Conference (KWI) is the focus of this article as it has strategic cross-organizational programs on a national scale to ensure the organization's mission for gender justice and equality. This organization is led by a Moderator, assisted by a Secretary and 8 expert administrators from various fields who are responsible for the designated work areas to facilitate and accompany the regional administrators in developing programs in each Region. Consistently and integratedly, they hold regular meetings to socialize policies, discuss, and share experiences to ensure everything runs smoothly. One of the major activities attended by all administrators, regional representatives, and organizational partners is the Plenary Meeting. This paper will examine the role of organizations, interactions and materials in the 2025 Plenary Meeting based on the concept of Gender, participation methods and relevant theories of Organizational Communication.

Keywords: *Gender, SGPP KWI, System Theory, Modern Organizational Theory, PAR*

Riwayat Artikel: Masuk: 13 Januari 2025 | Revisi: 16 Juni 2025 | Diterima: 23 Juni 2025 | Diterbitkan: 30 Juni 2025



Pendahuluan

Masalah Gender masih terus menjadi persoalan dalam kehidupan modern saat ini. Gender ditinjau sebagai sebuah konsep yang bertumpu pada sisi biologis manusia, bahwa gender memiliki dua kategori yang berbeda namun seyogyanya saling melengkapi. Secara sederhana perbedaan ini dapat dilihat dari penggunaan istilah Seks yang adalah pembagian jenis kelamin (*sex differences*). Perbedaan antara laki-laki dan perempuan ini menjadi dasar pijak sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang secara kodrati memiliki fungsi-fungsi organisme yang berbeda. Alat-alat biologis tersebut melekat pada laki-laki dan perempuan di mana secara fungsi tak dapat dipertukarkan dan sifatnya universal. Sedangkan gender adalah sifat yang dibentuk oleh faktor-faktor sosial maupun budaya.

Pembagian peran dan kerja dalam pengertian seksual dipandang sebagai sesuatu yang wajar, namun kemudian ditemui bahwa perbedaan seks menjadi penyebab ketidakadilan gender (*gender inequality*). Dalam perkembangan zaman dengan segala kondisinya, perlu dipahami bahwa mengupas soal gender, bukanlah sekadar berbicara relasi timpang di antara kaum perempuan dan laki-laki. Isu gender mencakup harkat dan martabat manusia, sehingga cakupannya menjadi lebih luas. Dalam arti lain bahwa membahas tentang gender berarti berbicara tentang kemanusiaan dalam kaitannya dengan aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, bahasa, bahkan lingkungan hidup. Hal ini masih kurang dipahami oleh masyarakat, maka tujuan dari artikel ini adalah untuk memberi gambaran tentang pengertian gender dan isu-isu terkait dari berbagai sudut yakni pemerintah, akademisi, aktivis dan terutama melalui institusi keagamaan.

Adapun fokus dari penelitian ini adalah peran Sekretariat Gender Dan Pemberdayaan Perempuan (SGPP) Konferensi Waligereja Indonesia (KWI). SGPP KWI sebagai salah satu lembaga di bawah Gereja Katolik yang memiliki misi untuk mempromosikan, memfasilitasi, mengawal dan mengukur sejauh mana kesetaraan



gender dan kedudukan kaum perempuan sudah diusahakan dalam lingkup KWI, keuskupan-keuskupan, paroki-paroki, lembaga-lembaga gerejawi, ormas berlandaskan agama Katolik dan kehidupan menggereja secara umum.

Konsep dan Teori

Gender dalam Gereja Katolik didasari pada pemahaman bahwa manusia adalah citra Allah sendiri. (Kej 1:27). Manusia memiliki keunikan, bebas dan bermartabat, bukan obyek yang dapat dieksploitasi, sehingga perempuan tidak berkedudukan lebih rendah dari laki-laki. Konsep Gender dari setiap agama yang diakui di Indonesia memiliki nilai-nilai agung. Sebagai contoh, pemahaman gender yang dikutip dari tulisan Nayla Sakinah, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta (Sakinah, 2023). Ia mengatakan bahwa, "Perempuan dalam Islam memiliki peran yang komprehensif dan setara dengan laki-laki, memiliki kedudukan yang tinggi sebagai hamba Allah, dan mengemban Amanah yang sama." Di sisi lain, Buddha diakui sebagai ajaran untuk siapa pun, tanpa membedakan jenis kelamin maupun status sosial. Sang Buddha memahami bahwa kualitas batin seseorang bukan berdasarkan jenis kelamin, kasta, kelahiran, namun karena perilaku manusia itu sendiri (Sartono, 2023).

Gereja Katolik sebagai salah satu institusi tertua dan terbesar di dunia memberi perhatian penuh terhadap isu gender. Lembaga ini telah berdiri selama lebih dari dua milenium. Menurut *Annuarium Statisticum Ecclesiae* (Buku Tahunan Statistik Gereja) 2023, jumlah umat Katolik di seluruh dunia mengalami peningkatan sebesar 1,15% antara tahun 2022 dan 2023, dari 1,39 miliar menjadi 1,406 miliar jiwa. Dengan jumlah umat yang besar dan tersebar luas, Gereja Katolik memiliki struktur hierarki yang diorganisir secara rapih, sehingga memungkinkan tersosialisasinya pesan-pesan penting Gereja dari pucuk pimpinan hingga komunitas di akar rumput. Hierarki ini dipimpin oleh seorang Paus sebagai pemimpin tertinggi Gereja Katolik seluruh dunia



dengan jenjang di bawahnya mencakup tingkatan kardinal, uskup, pastor, suster, dan bruder. Berdasarkan Teori Sistem (David Easton), institusi merupakan kesatuan yang terbentuk dari beberapa unsur dan memiliki keterkaitan yang mengikat dan fungsional. Masing-masing anggota saling terlibat satu sama lain sehingga totalitas unit/regio dapat terjaga utuh eksistensinya (Easton, 2015).

Gereja Katolik berperan aktif dalam mengatasi persoalan-persoalan global seperti isu lingkungan dengan ensiklik Laodato Si mengibaratkan bumi sebagai rumah bersama yang harus dirawat dan Fratelli Tutti bertujuan membangun persaudaraan tanpa batas. Dalam menelaah peran dari SGPP KWI akan dilakukan peneropongan melalui konsep-konsep *Organizational Communication Approaches and Process* oleh Katherine Miller (Miller, 2015). Salah satu teori yang dikemukakan dalam bukunya adalah Karl Weick's *Theory of Organizing* (Miller, 2015). Teori ini mendefinisikan organisasi sebagai suatu proses yang terus menerus berubah dan menyesuaikan, bukan entitas yang pasif. Gagasan inti dari teori ini adalah bahwa organisasi berada dalam suatu lingkungan, dan lingkungan ini bukan sekadar lingkungan fisik, melainkan lingkungan informasi. Hal ini diperkuat dengan teori *Communicative Constitution of Organizations (CCO)* (Miller, 2015) yang memandang organisasi bukan hanya suatu wadah yang membatasi proses komunikasi, melainkan proses interaksi setiap pemangku kepentingan agar mampu menciptakan, menciptakan kembali, dan mengubah organisasi.

Salah satu pertemuan besar SGPP KWI adalah Rapat Pleno yang diselenggarakan setiap tiga tahun sekali guna menyusun program-program ke depan, melapor dan mengevaluasi program yang telah terlaksana untuk kemudian mengambil langkah strategis guna mewujudkan misinya. Merujuk pada *The Activity Coordination Flow*, alur koordinasi aktivitas mengarah pada interaksi berkelanjutan yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan dalam suatu organisasi. Alur ini



<https://ejournal.uki.ac.id/index.php/inada/> email: jurnal.inada@uki.ac.id

menyoroti gagasan saling ketergantungan dan berkordinasi selaras dengan apa yang telah dikemukakan tentang Teori Sistem.

Peran penting dalam kelangsungan sebuah organisasi adalah peran dari seorang pemimpin (*Organization Leadership*) sebagai pihak yang memahami permasalahan organisasi secara mendalam, mendukung upaya perubahan yang tepat, dan siap menghadapi krisis organisasi. Peran komunikasi dalam proses kepemimpinan dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. Misalnya, isi komunikasi yang tepat akan bervariasi dari satu situasi ke situasi lainnya, tetapi penelitian menunjukkan beberapa gambaran tentang apa yang dikatakan para pemimpin yang efektif. Philip Clampitt, Robert DeKoch, dan Thomas Cashman (2000) mengemukakan strategi komunikasi efektif mencakup fokus pada tujuan organisasi, memetakan isu-isu penting, mengesampingkan hal-hal yang tidak relevan, menentukan poin-poin utama untuk dilaksanakan/dikembangkan. Moderator SGPP KWI memegang peranan penting dalam hal kepemimpinan organisasi dan sebagai narasumber utama pada Rapat Pleno.

Metode

Karya tulis ini disusun melalui sebuah penelitian kualitatif. Creswell, J. W mengutarakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang dipakai untuk meneliti persoalan manusia dan sosial (Creswell, 2010). Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena individu atau kelompok, sebagaimana juga dinamika sosial, keyakinan, sikap dan persepsi. Penulis menggunakan Metode Penelitian Deskriptif yaitu teknik penelitian yang cara penumpulan datanya memungkinkan peneliti untuk memaparkan fenomena sosial yang diamati dalam hal ini peran SGPP KWI. Pendekatan dalam penelitian dilakukan melalui *Participation Action Research* (PAR). Riset PAR adalah studi yang melibatkan secara cerdas para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam mengkaji persoalan



<https://ejournal.uki.ac.id/index.php/inada/> email: jurnal.inada@uki.ac.id

yang terjadi guna melakukan transformasi dan pemulihan. PAR mencakup tiga aspek penting yakni *participatory* yang artinya keikutsertaan; *Action* yang bermakna gerakan maupun tindakan; serta *Research* yaitu pengamatan (Pius, Partan, Al-Barry, 2006).

Rapat Pleno SGPP KWI yang bertema Berjalan Bersama Sebagai Insan Pengharapan Bagi Perwujudan Keadilan dan Keadilan Gender, diadakan pada 27 – 30 Juni 2025 di Jakarta. Melalui partisipasi aktif penulis, diperoleh kesan bahwa seluruh peserta yang hadir mengambil bagian secara antusias, baik dalam diskusi, presentasi maupun *sharing*. Keberhasilan dalam Rapat ini juga sangat ditentukan oleh narasumber dan moderator serta ketepatan dalam memilih peserta yang adalah individu-individu yang terlibat langsung di lapangan dalam kegiatan yang mengupayakan keadilan dan kesetaraan gender. Pengamatan penulis didukung dengan keterlibatan pada organisasi-organisasi mitra KWI yakni Dewan Pengurus Pusat WKRI dan sebagai Ketua Yayasan Sinergi Perempuan Indonesia (SPI).

Hasil dan Pembahasan

Gereja Katolik di Indonesia memiliki organisasi Federasi yang disebut dengan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), sebelumnya dikenal sebagai Majelis Agung Waligereja Indonesia (MAWI). Organisasi ini menghimpun para uskup sebagai waligereja di seluruh Indonesia, dengan tujuan menggalang persatuan dan kerja sama dalam menjalani tugas pastoral di wilayah keuskupan masing-masing. SGPP KWI merupakan institusi formal Gereja Katolik di Indonesia yang menangani pemberdayaan perempuan dan masalah gender. Hal ini menunjukkan perhatian Gereja Katolik terhadap isu-isu universal dan partisipasi kaum perempuan di semua tataran kehidupan (SGPP KWI, 2025). Sebagai mediator SGPP KWI melakukan proses edukasi dan sosialisasi sebagaimana layaknya proses komunikasi manusia yang berupaya mengembangkan hakikat bersama melalui interaksi sosial. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Pamela S. Shockley-Zalabak, *Human*



communication process attempts to construct shared realities through social interaction (Zelabak, 2015). Peran SGPP bersifat lintas komisi dan lintas organisasi sekaligus sebagai saluran resmi dalam hubungannya dengan institusi serupa, baik pemerintah maupun organisasi masyarakat.

Dalam melaksanakan fungsinya, SGPP KWI melakukan berbagai mekanisme komunikasi seperti diskusi, rapat internal maupun eksternal, seminar serta *Focus Group Discussion* (FGD). Pertemuan besar diselenggarakan setiap tiga tahun sekali berupa Rapat Pleno yang pada tahun ini dihadiri oleh 73 peserta dari utusan 38 Keuskupan dan *Ordinariatus Castrensis Indonesia* (OCI), pengurus SGPP KWI, serta perwakilan dari Mitra Organisasi yakni Ketua Presidium DPP WKRI serta Ketua Yayasan SPI. Mgr. Dr. Valentinus Saeng, CP, Moderator SGPP KWI dalam presentasinya bertema Visi Antropologi Kristiani Tentang Manusia dan Gender membuka pemahaman peserta terhadap filosofis tentang gender. Menurutnya, kunci untuk menangkap sebuah ideologi tergantung pada cara memahami siapakah manusia. Ketika orang menempatkan manusia sebagai ciptaan, maka dapat dimengerti bahwa ia beraliran Theos artinya orang yang memiliki cara pandang religius. Tetapi jika orang hanya memandang manusia sebagai makhluk yang berada di dalam dunia dengan segala persoalannya, tanpa visi di masa depan maka ini masuk pada pola pikir Agnostik. Berbeda dengan Ateisme yang secara tegas menolak keberadaan Tuhan, Agnostik tidak memiliki keyakinan pasti akan keberadaan Tuhan. Dalam pengertian ini, seseorang hanya melihat manusia dari kacamata insani dengan kemampuan akal budinya.

Dalam kancah gereja Katolik emansipasi kaum perempuan dapat ditemukan pada pendiri-pendiri kongregasi yang banyak bermunculan di abad 18 dan 19. Pada masa itu kelahiran ordo kongregasi merupakan respon terhadap situasi sosial yang sedang berlangsung aktual yaitu revolusi industri. Revolusi industri meruntuhkan atau merusak struktur masyarakat dan keluarga sehingga suami istri aktif bekerja,



<https://ejournal.uki.ac.id/index.php/inada/> email: jurnal.inada@uki.ac.id

kemudian anak-anak tidak terawat. Kaitannya dengan gender bahwa situasi ini mendorong tampilnya kaum perempuan yang peduli terhadap harkatnya. Hal ini telah membuka hasrat kaum perempuan untuk berperan di luar rumah ujud emansipasi perempuan.

Selanjutnya, situasi tersebut menggiring para pekerja ke dalam sistem Kapitalis, sebagaimana dalam teori Karl Marx tentang revolusi sosial yaitu terciptanya sistem masyarakat tanpa kelas. Hanya kalangan yang tertindas inilah yang akan menciptakan suatu tatanan baru seperti dalam kisah para rasul di mana manusia memiliki segala sesuatu berdasarkan keperluan dan bukan karena keinginan. Maka kelas pekerja dengan segala kritiknya berupaya memperbaiki sistem upah, jaminan hidup para pekerja sehingga bagi mereka yang memiliki keamanan hidup tidak akan lagi terpicu untuk melakukan pemberontakan. Melalui semangat *Duc In Altum* (istilah dari bahasa Latin yang secara harfiah artinya bertolak ke tempat yang dalam), yakni melihat lebih dalam baik secara substansi dan esensi, maka perlu diusahakan terus menerus agar tercipta pemahaman yang utuh dan menyeluruh tentang manusia. Dengan demikian masyarakat mampu membedakan peran yang bersifat kodrati dengan peran yang lahir dan berkembang dari kesepakatan sosial antar anggota masyarakat di ruang publik. Hal ini merupakan tanggapan dari Prof. Francisia Saveria Sika Seda, M.A., Ph.D, guru besar Sosiologi FISIP UI terhadap pemaknaan manusia.

Dr. Amurwani Dwi Lestariningsih, Deputy Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengulas tema Praktik pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Pembangunan. Menurutnya, ketimpangan gender yang masih tinggi merupakan salah satu penghambat dalam pelaksanaan pembangunan yang inklusif. Sejalan dengan keterangan di atas, Andi Yentriyani, Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) 2020-2025 mengatakan, ketimpangan gender dipicu dengan belum



<https://ejournal.uki.ac.id/index.php/inada/> email: jurnal.inada@uki.ac.id

optimalnya peran dan fungsi keluarga sehingga menyebabkan ancaman krisis moral dan karakter di kalangan generasi muda. Selain itu kesetaraan gender dan pembangunan inklusif menjadi semakin sulit disebabkan masih adanya norma sosial budaya yang membiarkan terjadinya diskriminasi dan perlakuan yang salah.

Prof. Stella Christie, Ph.D, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi mengusung tema Membangun Kesadaran Sosial melalui Pendidikan di mana Kesetaraan Gender menjadi tanggung jawab Bersama. Ia menekankan bahwa berbicara tentang kesetaraan gender perlu dilandasi dengan data empirik. Dalam sebuah penelitian di Amerika terhadap kaum perempuan, menunjukkan bahwa kaum perempuan yang lulus sarjana jumlahnya lebih sedikit dibanding kaum laki-laknya. Persepsi ini tampaknya berlaku secara umum di masyarakat modern seperti di Indonesia, bahwa kaum laki-laki yang mencapai pendidikan S1 (Sarjana Strata 1) lebih banyak dibanding kaum perempuan. Pemikiran yang keliru sering kali didasari pada jumlah penduduk perempuan yang lebih banyak dari laki-laki. Data sensus 2024 menyatakan bahwa jumlah penduduk laki-laki dan perempuan adalah seimbang.

Sementara itu, dalam praktik dunia kerja,, data BPJS mengindikasikan bahwasannya perempuan lulusan S1 yang bekerja lebih sedikit daripada kaum laki-laki berijazah S1. Hal ini tidak berbanding lurus dengan gaji yang diterima, pada kenyataannya penghasilan pekerja perempuan dinilai lebih rendah dibanding pekerja laki-laki, meskipun memiliki tingkat pendidikan yang sama. Prof. Stella mengakui, sering kali perempuan tidak bernegosiasi tentang gaji dibanding dengan kaum laki-laki, sehingga terjadi kesenjangan upah. Terkait dengan hal ini, *An International Journal Equality, Diversity and Inclusion* menyebutkan, meningkatnya keberagaman dalam angkatan kerja merupakan konsekuensi dari tren sosial-ekonomi seperti hak asasi manusia, hak perempuan, dan hak sipil yang dapat berkontribusi pada peningkatan partisipasi angkatan kerja dari kelompok-kelompok yang secara tradisional kurang terwakili (Calluso, Devetag, 2023).



<https://ejournal.uki.ac.id/index.php/inada/> email: jurnal.inada@uki.ac.id

Perempuan dan laki-laki tidak berbeda dalam kemampuan ruang, geometri, kesanggupan menghitung, ataupun kemampuan navigasi. Masyarakat masih beranggapan bahwa laki-laki memiliki kemampuan lebih di bidang-bidang tersebut. Peran sosial dan orang tua perlu menghapus mitos ini. membentuk lingkungan dan pengajaran yang mendukung kesetaraan, mengenalkan matematika dan sains sejak dini kepada anak-anak dalam cara yang sederhana. Contoh, ketika seorang anak perempuan membantu ibunya memasak, lalu sang ibu meminta anaknya untuk menambah satu sendok kecil garam agar makanan yang hambar menjadi lebih asin. Makna yang ingin diberikan kepada anak adalah jika hanya 1 sendok kecil makanan hambar tetapi 2 sendok kecil menjadi lebih asin. Cara lain misalnya melihat meja tak sekedar sebuah meja tetapi meja yang memiliki empat sudut.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) , Dra. Hj Arifatul Choiri Fauzi. M.Si menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 telah menetapkan arah pembangunan manusia inklusif dan berkeadilan, sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG's). Dalam konteks ini, pengarusutamaan gender tidak dilihat sebagai isu sektoral, melainkan sebagai fondasi transformasi sosial dengan telah dibukanya akses bagi perempuan untuk berpartisipasi aktif di ruang publik. Namun, fakta mengungkapkan kalau masih ada tantangan besar dalam memperjuangkan kesetaraan gender. Hasil survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2024 dan survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2024 menampakkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi keprihatinan besar. Hasil SPHPN 2024 memperlihatkan bahwa 1 dari 4 perempuan usia 15-64 tahun di Indonesia pernah mengalami kekerasan seksual dan/ atau fisik. Sementara hasil SNPHAR 2024 menunjukkan bahwa 1 dari 2 anak usia 13-17 tahun pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya.



<https://ejournal.uki.ac.id/index.php/inada/> email: jurnal.inada@uki.ac.id

Angka-angka tersebut tidak hanya sekadar statistik, dibalikny ada kisah trauma, penderitaan dan dampak buruk bagi korban kekerasan. Selebihnya adalah rentetan penderitaan fisik, mental/psikologis, kesehatan, ekonomi, dan sosial. KPPPA mengakui, peran lembaga keagamaan memiliki potensi besar untuk menjadi pelaku perubahan, yang tidak hanya menjunjung tinggi martabat perempuan dan laki-laki secara spiritual, tetapi juga menjamin peran serta yang adil dalam kehidupan umat. Institusi-institusi ini dapat menjadi pelopor dengan memberikan ruang afirmatif bagi perempuan untuk memimpin, melayani, dan menyuarakan aspirasi mereka secara lebih transformatif (KPPPA, 2025). Untuk mewujudkan ruang inklusif akan lebih ringan jika dilakukan bersama dengan membangun kolaborasi yang kokoh antara lembaga-lembaga agama dengan negara.

Selain materi krusial yang disampaikan oleh para narasumber, Rapat Pleno dibungkus dengan *sharing* praktik-praktik nyata di akar rumput yang telah dilakukan secara berkesinambungan oleh para aktivis dan pengurus di setiap regio. Mereka menyentuh karya pelayanan yang lebih dalam dan aktual, antara lain terkait dengan penanganan penderita lepra yang terkucilkan, pemasungan, perkawinan inses, perkosaan dalam keluarga, dan perdagangan orang. Tantangan para aktivis di wilayah terluar karena masih terbatasnya pengawasan dan keamanan sehingga menjadi jalur empuk sindikat perdagangan narkoba, perdagangan orang, serta tindak kriminal lainnya (BNPP RI, 2024). Ke semua itu sering kali terbentur pada aspek-aspek kemiskinan dan hukum yang masih enggan berpihak.

Kesimpulan

Gerakan transformasi sosial guna mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender perlu dilakukan bersama, serempak dan berkesinambungan melalui metode pentahelix yakni kolaborasi lima unsur utama pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha dan media. Pendidikan gender perlu dimulai secara dini kepada anak-



<https://ejournal.uki.ac.id/index.php/inada/> email: jurnal.inada@uki.ac.id

anak tak cukup hanya melalui pendidikan formal, tetapi mulai dari pendidikan dasar dalam keluarga. Peran lembaga keagamaan menjadi penting karena sering kali menjadi jembatan saat menghadapi kebuntuan karena unsur budaya setempat. Perubahan kebijakan akan lebih mudah jika dibarengi dengan perubahan kultur. Institusi-institusi keagamaan dapat menjadi semakin kuat perannya manakala terlibat dalam sinergitas dengan pemerintah maupun dengan sesama lembaga keagamaan, untuk mempromosikan dan mengawal gerakan keadilan dan kesetaraan tanpa mengabaikan konteks lokal yaitu perubahan kultur dan struktur di setiap daerah.

Daftar Pustaka

- Begini Strategi Lemhannas RI dan BNPP dalam Pemberantasan Kejahatan Transnasional Terorganisir di Lintas Batas Negara, BNPP RI, 21 Mei 2024
- Calluso, Cinzia and Devetag, Maria Giovanna. (2023). Discrimination in the hiring process – state of the art and implications for policymakers. Departme Business and Management, LUISS University, Rome, Italy. *Equality, Diversity and Inclusion: An International Journal*. Emerald Publishing, Canada. Diunduh pada 12 Juli 2025 dari <https://www.emerald.com/insight/2040-7149.htm>
- Creswell, J.W. (2008). Educational research: Planning, conductiong, and evaluating quantitative and qualitative research (3rd ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
- DeVito, Joseph. A. (2019). The Interpersonal Communication. (15th ed.). Hunter College of the City University of New York, USA: Person
- Easton, David. (2020). An Approach to The Analysis of Political Systems, *World Politics*. Vol 9, no 3. USA: The Johns Hopkins University Press
- George Ritzer. (1985). Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda, Rajawali: Depok Jawa Barat
- John W. Creswell dan J. David Creswell. (2018). Research Design, California: Sage.
- Katherine Miller. (2015). Organizational Communication Approaches and Process . (7th ed.). Arizona State University, USA: Cengage Learning.



<https://ejournal.uki.ac.id/index.php/inada/> email: jurnal.inada@uki.ac.id

- Kementerian Agama RI. (2023). Ajaran Buddha tentang Kesetaraan Gender. Diunduh pada 17 Juli 2025 dari <https://kemenag.go.id/buddha/ajaran-buddha-tentang-kesetaraan-gender>
- Kementerian Perencanaan Pembangunan (Bappenas). (2017). Buku Terjemahan Tujuan & Target Global Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / *Sustainable Development Goals* (SDGs), Jakarta.
- Mullins J. Laurie. (2005). *Management and Organisational Behavior*. (7th ed.). Essex: Pearson Education Limited.
- Pius, A. Partan dan M. Dahlan Al-Barry. (2006). *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola,
- Sakinah, Nayla. (2023). Konsep Keadilan Gender dalam Perspektif Islam. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Diunduh pada 17 Juli 2025 dari <https://jakarta.nu.or.id/opini/konsep-keadilan-gender-dalam-perspektif-islam-sACpS>.
- Zalabak, Pamela S. Shockley. (2015). *Fundamentals of Organizational Communication Knowledge, Sensitivity, Skills, Values* (9th ed.). University of Colorado, USA: Pearson.